



DINAMIKA KEBIJAKAN TURKI TERHADAP KRISIS PENGUNGSI SURIAH DARI 2011-2024 DAN DAMPAKNYA PADA HUBUNGAN EROPA-TIMUR TENGAH

Arya Syarief Hermawan

Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung
aryasyariefh@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to analyze the demographic and social impacts of the presence of Syrian refugees in Turkey and to assess the government's policies in managing the crisis since 2011. The research employs a historical qualitative method through the stages of heuristics, source criticism, interpretation, and historiography. Data were collected from UNHCR reports, Turkish government statistics, and academic literature on migration and regional geopolitics. The findings show that more than 3.3 million Syrian refugees by 2024 have caused significant demographic changes, particularly in major urban areas such as Istanbul, Gaziantep, and Sanliurfa. Socially, refugees face integration challenges in education, healthcare, and employment, creating new social dynamics with local communities. The Turkish government responded through the OpenDoor Policy, temporary protection status, and strategic cooperation with the European Union. In conclusion, Turkey's refugee policy reflects not only humanitarian concern but also geopolitical strategy, strengthening its role in the Middle East and Europe. However, long-term challenges, including social integration and economic pressure, require more sustainable and inclusive policy approaches.

Keyword: *Syrian Refugees; Turkey; Migration Policy; Geopolitics*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis dampak demografis dan sosial dari kehadiran pengungsi Suriah di Turki serta menilai kebijakan pemerintah dalam penanganannya sejak 2011. Metode yang digunakan adalah metode sejarah dengan pendekatan kualitatif melalui tahapan heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi. Data diperoleh dari laporan UNHCR, statistik pemerintah Turki, dan literatur akademik mengenai migrasi dan geopolitik kawasan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lebih dari 3,3 juta pengungsi Suriah hingga 2024 telah menyebabkan perubahan demografis signifikan, terutama di kota-kota besar seperti Istanbul, Gaziantep, dan Sanliurfa. Secara sosial, pengungsi menghadapi tantangan integrasi dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan, yang turut memicu dinamika sosial baru dengan masyarakat lokal. Pemerintah Turki menanggapi situasi ini melalui kebijakan Open Door Policy, pemberian perlindungan sementara, serta kerja sama strategis dengan Uni Eropa. Kesimpulan menunjukkan bahwa kebijakan Turki tidak hanya mencerminkan kepedulian kemanusiaan, tetapi juga menjadi instrumen geopolitik yang memperkuat perannya di kawasan Timur Tengah dan Eropa. Namun, tantangan jangka panjang seperti integrasi sosial dan tekanan ekonomi memerlukan kebijakan lanjutan yang lebih berkelanjutan dan inklusif.

Kata Kunci: Pengungsi Suriah; Turki; Kebijakan Migrasi; Geopolitik

PENDAHULUAN

Studi tentang perbatasan merupakan salah satu isu cukup krusial dalam geopolitik. Pemahaman akan ruang perbatasan bagi suatu negara menghasilkan pula kajian-kajian ilmiah dari berbagai bidang ilmu, khususnya ketika batas-batas formal suatu negara yang menjadi fokus pandangan kaum tradisional mulai kewalahan melihat perkembangan dunia geopolitik yang seakan-akan melampaui material atau fisik. Globalisasi mampu bergerak dan menerjang batas maya sehingga mampu memindahkannya kapan saja, tergantung bagaimana perkembangan arus modal dan semacamnya. Dengan demikian, perbatasan dapat dibagi menjadi dua pemahaman: pertama, bersifat fisik atau terlihat; dan kedua, melampaui fisik (Alatas, 2020; Newman, 2006).

Dalam studi perbatasan tradisional, batas-batas terhubung sesuai ketetapan spasial yang ditentukan. Hal itu juga tergantung sampai mana daerah yang alami dibagi sesuai kesepakatan-kesepakatan antar negara sehingga menciptakan perbedaan sosio-spasial antara tempat, individu, dan kelompok. Beberapa akedemisi yang menggunakan pendekatan konstruktivisme menganggap bahwa dalam tataran konseptual, perbatasan mampu mengubah sifatnya dari yang statis ke fungsional dinamis tergantung bagaimana pengamat mengkonstruksikannya. Karenanya, minimal terdapat dua cara guna memahami perbatasan: 1) cara pragmatis, yaitu memperoleh pengetahuan yang dapat digeneralisasikan dari praktik-praktik penciptaan perbatasan, konfirmasi, dan transendensi; dan (2) cara kritis, yakni berteori, mempertanyakan, dan membandingkan pelbagai kondisi yang menciptakan berbagai kategori perbatasan (Alatas, 2020).

Hingga saat ini, pendefinisian terhadap istilah perbatasan (*bordering*) selalu mengalami re-evaluasi sangat kritis terkait hubungan antara negara, masyarakat dan perbatasan yang telah dibuat oleh para cendekiawan. Seperti yang dikatakan oleh Kolosov dan Scott, bahwa istilah perbatasan (*bordering*) menunjukkan bahwa perbatasan merupakan sebuah proses yang belum final. Karena itu, hubungan sosial yang secara inheren bersifat politis serta berubah-ubah akan selalu bertautan dengan peran sosial, perspesi, dan penggunaan ruang (Scott, 2021). Sebagai praktik sosial-spasial, perbatasan memainkan peran yang penting dalam membentuk teritorial manusia dan peta politik sehingga wajar ketika setiap kelompok sosial dan regional mempunyai citra wilayah dan batasnya masing-masing (Alatas, 2020). Dengan berdasar pada teori sosial tersebut bisa dikatakan bahwa hubungan antar negara yang berbatasan langsung seperti Turki dan Suriah rentan menimbulkan konflik yang diakibatkan oleh perubahan hubungan sosial dan perbedaan kelompok-individu dari masing-masing pihak yang bersangkutan. Hasil dari rawannya konflik antar negara tersebut menciptakan banyak kebijakan baru untuk mencegah konflik tersebut bisa terulang kembali, yang pada penelitian ini terfokus pada kebijakan terhadap masalah krisis kemanusiaan yang disebabkan oleh pengungsi Suriah.

Krisis kemanusiaan sendiri merupakan hal yang memprihatinkan beberapa tahun belakangan ini. Salah satu krisis kemanusiaan yang terjadi adalah perang Suriah sebagai akibat dari peristiwa Arab Spring tahun 2011. Gelombang demonstrasi akibat dari tuntutan penurunan rezim Bashar Al-Assad menyebabkan konflik dan kekerasan yang berakibat pada perang saudara. Konflik dan kekerasan yang berlarut-larut menyebabkan keamanan manusia masyarakat Suriah menjadi terancam. Dalam hal ini masyarakat Suriah tidak mendapatkan

perlindungan dasar sebagai warga negara, baik perlindungan akan kehidupan, mata pencaharian, bahkan pelanggaran hak asasi manusia yang meluas (Larasati et al., 2025).

Turki sendiri merupakan negara dengan mayoritas penduduk Muslim yang terletak antara Eropa dan Asia. Secara geografis berbatasan langsung dengan 900 km bagian Tenggara Suriah dan Yunani sebagai batas wilayah Barat sehingga memiliki akses yang strategis antara gerbang Timur dan Barat. Kondisi strategis tersebut yang mempengaruhi geopolitik Turki dalam menjalin kerja sama dengan negara-negara di berbagai kawasan. Fleksibilitas politik luar negeri Turki yang berdasarkan dengan Islam menjadikan Turki sebagai percontohan penerapan demokrasi di negara Islam dan Afrika Utara. Posisi Turki dalam hubungannya dengan Uni Eropa mengalami tantangan seiring perkembangan waktu. Banyaknya permasalahan yang terjadi di kawasan baik Eropa maupun Timur Tengah menjadikan Turki turut ikut berkontribusi dalam menyelesaikan permasalahan yang ada salah satunya penanganan pengungsi dari konflik Suriah (Wanda, 2017).

Dalam menanggapi krisis kemanusiaan di Suriah, Turki memutuskan menerapkan kebijakan untuk pengungsi yang dinamakan Open Door Policy atau kebijakan pintu terbuka. Kebijakan tersebut merupakan tanggapan kemanusiaan yang menonjolkan peran Turki dalam meringankan krisis pengungsi. Pada tahun 2011 dalam sebuah konferensi UNHCR di Jenewa, menteri dalam negeri mengumumkan bahwa Turki sedang menerapkan rezim "*Temporary Protection*" atau perlindungan sementara bagi pengungsi Suriah. Dalam konferensi tersebut, dijelaskan bahwa perlindungan sementara merupakan arah kebijakan yang terinspirasi dari "EU Temporary Protection Directive" yang berlandaskan pada 3 prinsip inti kemanusiaan. Kebijakan ini menjadi landasan bagi Turki dalam memberikan akses perlindungan dan layanan dasar kepada pengungsi Suriah yang masuk ke wilayahnya. Pertama perbatasan Turki akan tetap selalu terbuka bagi mereka yang mencari keselamatan di Turki. Kedua, tidak ada pemulangan pengungsi Suriah tanpa adanya persetujuan dari pengungsi tersebut, Terakhir Turki menerapkan kebutuhan akan kemanusiaan dasar bagi pengungsi (Larasati et al., 2025).

Permasalahan antar wilayah ini membuat pengungsi Suriah dengan posisi Turki sebagai perbatasan antara Eropa dan Asia menjadi tantangan tersendiri tidak hanya bagi Turki namun juga bagi negara-negara di kawasan Eropa. Berangkat dari fenomena tersebut, penelitian ini bertujuan membahas secara komprehensif bagaimana peran strategis Turki dalam krisis pengungsi Suriah tidak hanya memengaruhi stabilitas dan keamanan domestik, tetapi juga membentuk konfigurasi baru dalam hubungan antara Eropa dan Timur Tengah dari perspektif geopolitik dan kemanusiaan. Studi-studi sebelumnya, seperti penelitian milik Tsourapas (2019) dan Sholihin dan Alfian (2021), cenderung berfokus pada dimensi tunggal, baik dari aspek kemanusiaan maupun geopolitik secara terpisah, sehingga belum mampu menjelaskan secara memadai bagaimana kedua dimensi tersebut saling berinteraksi dan membentuk kebijakan Turki secara holistik. Selain itu, sebagian besar kajian yang ada membatasi analisis pada periode 2011–2016, tanpa menelusuri dinamika kebijakan pasca perjanjian EU-Turkey 2016 hingga 2024. Kesenjangan itulah yang menjadi celah penelitian yang hendak diisi oleh penelitian ini. Kontribusi utama penelitian ini terletak pada upaya mengintegrasikan analisis kebijakan domestik Turki dengan implikasi geopolitiknya dalam kurun waktu yang lebih panjang (2011–2024), sehingga menghasilkan pemahaman yang lebih komprehensif dan aktual mengenai peran strategis Turki dalam krisis pengungsi Suriah.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian sejarah yang terdiri dari empat tahapan yaitu heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi (Kuntowijoyo, 2005). Tahap heuristik dilakukan dengan mengumpulkan data dan fakta statistik dari sumber terpercaya, termasuk laporan UNHCR, data Badan Penanggulangan Bencana dan Kedaruratan Turki (AFAD), serta publikasi ilmiah yang menunjukkan perkembangan jumlah pengungsi Suriah di Turki sejak tahun 2011 hingga 2024. Data kuantitatif ini memberikan gambaran nyata tentang besarnya tanggung jawab yang diemban Turki serta perubahan kebijakan dari waktu ke waktu. Tahap kritik sumber dilakukan secara internal maupun eksternal untuk menilai otentisitas dan kredibilitas sumber. Selanjutnya, kajian literatur dilakukan untuk memahami konteks geopolitik dan aspek hubungan internasional yang melibatkan Turki, Uni Eropa, dan negara-negara Timur Tengah lain, merujuk pada kerangka teoritik Neorealisme dalam hubungan internasional dalam jurnal Waltz (1979) dan konsep diplomasi migrasi dari Tsourapas (2019). Referensi dari karya Asep Achmad Hidayat turut membantu memberikan perspektif kawasan dunia Islam yang kaya budaya dan sejarah, serta peran solidaritas keagamaan yang turut memengaruhi sikap Turki.

Langkah selanjutnya dalam penyusunan yaitu mengorganisasi pembahasan mulai dari sisi sosial dan demografis pengungsi di Turki, berlanjut pada kebijakan pemerintah yang mendukung penanganan krisis, peran diplomasi dan kerjasama Turki-Uni Eropa, hingga implikasi geopolitik yang melibatkan berbagai aktor. Setiap bagian didukung dengan analisis mendalam dan data yang relevan sehingga pembaca mendapatkan gambaran menyeluruh sekaligus kritis terhadap peran Turki.

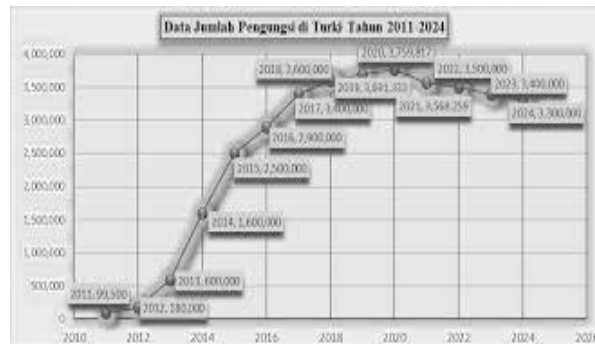
Tahap terakhir penyusunan diselesaikan dengan historiografi berupa kesimpulan yang merangkum bagaimana Turki berada di persimpangan kepentingan kemanusiaan dan geopolitik. Mereka memikul beban sosial sekaligus memainkan peran sentral dalam dinamika hubungan Eropa-Timur Tengah. Harapan besar penulis adalah agar artikel ini dapat menjadi sumbangan pemikiran yang bermanfaat bagi dunia akademis maupun pengambil kebijakan, membuka wawasan baru dalam memahami betapa kompleks dan peliknya isu pengungsi di masa kini, sekaligus menegaskan pentingnya peran strategis Turki di panggung internasional.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dampak Demografis dan Sosial Pengungsi Suriah di Turki

Kehadiran pengungsi di Turki disebabkan oleh kebijakan Turki yang menerima pengungsi atas dasar kemanusiaan, selain Turki juga merupakan salah satu jalur utama menuju Eropa dan Asia sehingga kondisi geografisnya cukup strategis bagi para pengungsi Suriah. Banyak pengungsi yang masuk ke Turki karena melihat Turki telah membuat kebijakan terbuka bagi para pengungsi yang tertuang dalam landasan hukum kebijakan Turki terhadap pengungsi. Pengungsi yang terus masuk ini menjadi sorotan sosial yang berdampak pada geopolitik Turki. Peningkatan pengungsi Suriah ke Turki menunjukkan negara ini menjadi salah satu negara tujuan yang memberikan perlindungan bagi warga yang terdampak konflik berkepanjangan di Suriah. Tingkat peningkatan arus migrasi dari tahun ke tahun tidak hanya memengaruhi perubahan komposisi demografis tetapi juga memengaruhi kondisi sosial, ekonomi, dan

kebijakan domestik Turki dalam menangani pengungsi. Statistik berikut menggambarkan besarnya peningkatan jumlah pengungsi yang diterima oleh Turki pada periode 2011-2019.



Sumber: (UNHCR, n.d.)

Sebagaimana terlihat pada gambar, pada tahun 2011 jumlah pengungsi yang memasuki Turki masih relatif rendah, sebanyak sekitar 99.500 orang, karena situasi konflik di Suriah masih dalam tahap awal. Namun, pada 2012 para pengungsi yang masuk ke Turki mengalami peningkatan menjadi sekitar 180.000 orang karena meningkatnya tindak kekerasan di Suriah. Pada tahun 2013 Turki menerima pengungsi yang masuk sekitar 600.000 orang, jauh lebih banyak dibandingkan tahun sebelumnya. Kemudian pada 2014 jumlah pengungsi terus bertambah hingga mencapai 1.600.000 orang, peningkatan jumlah pengungsi yang sangat signifikan. Turki menampung sekitar 2.500.000 orang pada tahun 2015 dan sebagian besar asal para pengungsi tersebut berasal dari negara Suriah. Selama adanya krisis pengungsi di Eropa, jumlah pengungsi yang masuk ke Turki meningkat cukup pesat hingga mencapai jutaan orang setiap tahunnya.

Pada tahun 2016 terdapat sekitar 2.900.000 orang yang masuk ke Turki. Tahun 2017 para pengungsi yang masuk berjumlah sekitar 3.400.000 orang yang mana kenaikan jumlah pengungsi tersebut tidak terlalu banyak seperti tahun sebelumnya. Selain itu, Turki juga menerima para pengungsi yang melarikan diri karena konflik sipil di Irak dan Afghanistan sehingga adanya peningkatan pengungsi yang masuk pada 2018 menjadi berjumlah sekitar 3.600.000. Hingga pada tahun 2019, Turki menampung sekitar 3.691.333 orang pengungsi, yang mana jumlah tersebut tak hanya disebabkan oleh pengungsi yang meninggalkan negaranya karena konflik saja melainkan juga karena adanya sebuah krisis di wilayah sekitar (Amin et al., 2025).

Turki menjadi negara yang paling banyak menerima pengungsi dengan jumlah 3.691.333 juta jiwa per 27 November 2019. Jumlah pengungsi pada tahun 2020 bertambah akibat terhambatnya pemberlakuan kebijakan repatriasi akibat pandemi COVID-19 sebanyak 3.759.817 pengungsi yang masuk ke Turki. Pada tahun 2021, jumlah pengungsi mengalami pengurangan menjadi 3.568.259 karena kebijakan repatriasi sudah diterapkan meskipun kondisi masih belum begitu stabil. Kemudian pada tahun 2022, terdapat 3.500.000 pengungsi. Di tahun 2023, pengungsi berjumlah 3.400.000 dan di tahun 2024 jumlah pengungsi menurun hingga 3.300.000 orang (UNHCR, n.d.). Pengungsi yang membludak dari tahun ke tahunnya ini juga disebabkan dari letak geografis antara Turki dan Suriah. Dinamika jumlah pengungsi yang terus berubah menunjukkan bahwa perpindahan penduduk akibat konflik disebabkan oleh banyak kondisi yang berkaitan, seperti jenis wilayah pengungsian. Untuk memahaminya, lihat peta di bawah ini untuk melihat posisi geografis Turki dalam kaitannya dengan Suriah.



Sumber: Shutterstock.com

Posisi geografis ini memungkinkan Turki menjadi pintu gerbang utama bagi pengungsi yang ingin mencari perlindungan secara cepat tanpa harus menempuh perjalanan panjang dan berbahaya seperti yang terjadi bagi pengungsi yang mencoba mencapai Eropa. Kawasan perbatasan di wilayah seperti Gaziantep, Kilis, dan Sanliurfa menjadi titik konsentrasi tinggi gelombang pengungsi karena kedekatan lokasi dan kemudahan akses masuk. Selain faktor jarak dan kemudahan akses, Turki juga secara geografis berdiri di persimpangan benua Asia dan Eropa, sehingga posisi ini memberikan keuntungan diplomatik dan strategis yang menjadi pertimbangan para pengungsi. Turki yang disebut-sebut sebagai negara paling maju dan relatif stabil di kawasan Timur Tengah dianggap sebagai tempat yang aman sekaligus memiliki potensi akses menuju wilayah Eropa, yang menjadi tujuan akhir banyak pengungsi (Agestia et al., 2023).

Keunggulan geografis ini secara langsung membentuk implikasi kebijakan yang signifikan, dimana Turki tidak sekadar menjadi negara transit atau penampung pasif, melainkan menggunakannya sebagai keuntungan geopolitik dalam negosiasi dengan Uni Eropa, yang nantinya juga akan dibahas melalui perjanjian EU-Turkey Statement 2016 yang memberikan Turki akses dana bantuan sebesar enam miliar euro serta pembahasan liberalisasi visa. Dengan demikian, faktor geografis bukan hanya menjelaskan mengapa Turki menjadi tujuan utama pengungsi, tetapi juga mengapa Turki mampu memosisikan dirinya sebagai aktor kunci dalam arsitektur hubungan Eropa-Timur Tengah kontemporer.

Melibatkan pengungsi dalam sektor tenaga kerja juga menjadi tantangan tersendiri. Banyak pengungsi berkompetisi dengan warga lokal dalam lapangan pekerjaan, terutama di sektor informal. Hal ini kadang menimbulkan gesekan sosial dan ketidakstabilan, terutama di kawasan yang secara ekonomi sudah rentan. Hanya sebagian pengungsi yang memiliki izin kerja resmi sehingga mereka sering kali bekerja dalam kondisi yang tidak terlindungi secara hukum. Seiring waktu, ketimpangan sosial dan ekonomi ini berpotensi memicu diskriminasi dan konflik antar komunitas. Dari sisi sosial budaya, proses integrasi berlangsung dengan tingkat kesulitan yang beragam. Bahasa, adat istiadat, dan variasi agama yang berbeda menjadi penghalang dalam menjalin hubungan harmonis antara pengungsi dan warga Turki. Sebagian pengungsi masih menghadapi stigma dan stereotip negatif yang berpotensi menghambat proses adaptasi mereka. Meski demikian, ada komunitas-komunitas dan wilayah di Turki yang menunjukkan tingkat toleransi yang cukup tinggi, di mana interaksi sosial dan kerjasama antar pengungsi dan warga lokal berlangsung secara positif dan memberi ruang bagi dinamika keberagaman baru yang dapat mempererat solidaritas sosial. Tantangan tidak berhenti pada aspek sosial dan ekonomi, tetapi juga menyentuh dimensi psikologis dan kesehatan mental pengungsi yang mengalami trauma akibat perang dan pengungsian panjang. Ketidakpastian

masa depan dan kondisi hidup yang sulit menuntut pemerintah dan lembaga kemanusiaan untuk menyediakan fasilitas psikososial agar integrasi berjalan optimal (Erol & Kultu, 2022).

Kebijakan Turki dalam Penanganan Pengungsi Suriah

Berawal dari Arab Spring yang berada di Suriah, krisis kemunusiaanpun terjadi sehingga menimbulkan banyak korban yang terluka, kehilangan keluarganya bahkan meninggal dunia. Sehingga warga yang mengalami penderitaan tersebut memilih tujuan ke negara yang lebih aman. Salah satu tujuan mereka adalah Turki. Presiden Recep Tayyip Erdogan akhirnya merespon datangnya arus pengungsi Suriah dengan menerapkan Open Door Policy yang berartikan kebijakan pintu terbuka bagi para pengungsi Suriah. Kebijakan ini secara yuridis memberi hak pengungsi untuk tinggal dan menetap di wilayah Turki. Keputusan Turki membuka perbatasan tidak semata-mata bersumber dari pertimbangan kemanusiaan, melainkan juga didasari oleh kalkulasi geopolitik. Melalui penerimaan pengungsi, Turki membangun posisi tawar yang lebih kuat dalam negosiasi dengan Uni Eropa dan komunitas internasional (Tsourapas, 2019). Meskipun kebijakan ini memiliki sejarah panjang dalam pembentukannya, penulis membatasi pembahasan pada periode 2011–2016 sebagai fase formasi kebijakan modern. Konflik yang menimpa Suriah antara rezim Assad dan kelompok oposisi terus berlangsung, mendorong warga sipil mencari keamanan di luar negaranya. Beberapa negara menjadi tujuan utama pengungsi, dengan Turki menjadi pilihan paling strategis karena kedekatan geografis dengan Suriah. Respon Turki yang terbuka terhadap pengungsi Suriah akhirnya dilembagakan melalui Open Door Policy beserta dasar hukum mengenai pengungsi yaitu Law on Foreigners and International Protection (LFIP) tahun 2013. Namun demikian, dalam kurun dua tahun setelah pemberlakuan, Turki mulai menghadapi berbagai tantangan substantif terkait kebijakan Open Door Policy ini, terutama akibat tekanan gelombang pengungsi masif yang melampaui kapasitas penampungan nasional (A'yuni, 2019). Kebijakan Oper Door Policy terbilang memiliki banyak polemik, dimana di satu sisi kebijakan ini memperbolehkan pengungsi masuk dengan tujuan menambah populasi penduduk Turki untuk diberdayakan sumber daya manusia nya, namun di sisi lain populasi yang terus bertambah tersebut tidak terbandung dan malah menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah Turki.

Kebijakan Open Door Policy yang diterapkan oleh Turki sejak awal krisis Suriah pada tahun 2011 merupakan kebijakan yang sangat mendasar dan berperan besar dalam membentuk konteks penanganan pengungsi di negara tersebut. Kebijakan ini menandai sikap terbuka dan humanis Turki untuk menerima masuknya pengungsi Suriah tanpa banyak hambatan administrasi atau pembatasan ketat. Dalam situasi perang yang memaksa jutaan warga Suriah melarikan diri, kebijakan ini memberikan solusi cepat untuk perlindungan langsung, khususnya bagi yang melintasi perbatasan Turki yang cukup panjang, yakni hampir 900 kilometer. Kebijakan Open Door ini berbeda dengan kebijakan negara lain yang lebih menutup perbatasan atau hanya mengizinkan pengungsi dalam jumlah terbatas. Turki membuka akses bagi siapa saja yang melarikan diri dari konflik, menyediakan kamp pengungsian sementara di wilayah-wilayah perbatasan seperti Gaziantep, Kilis, dan Sanliurfa yang dilengkapi fasilitas kesehatan, pendidikan, dan bantuan kemanusiaan dasar. Pada fase awal, kamp-kamp ini berfungsi sebagai penampungan darurat yang mampu menampung

ratusan ribu orang dengan pengelolaan yang didukung oleh pemerintah Turki, UNHCR, dan berbagai organisasi sosial kemanusiaan (Saraçoğlu & Bélanger, 2025). Respon dari masyarakat Turki sendiri terhadap kebijakan ini beragam, namun mayoritas masyarakat memberikan respon yang kurang baik terhadap para pengungsi.

Penerapan Open Door Policy berdampak pada dinamika sosial yang terjadi di Turki. Dalam Syrian Barometer terdapat beberapa poin hasil observasi mengenai dampak Open Door Policy terhadap penerimaan pengungsi Suriah di Turki. Bagi masyarakat lokal, kehadiran pengungsi Suriah menimbulkan kekhawatiran akan keamanan Pertama, respon mengenai masyarakat Suriah merupakan orang yang menyebabkan masalah sosial dan ekonomi di Turki pada masa depan bersamaan dengan respon masyarakat Suriah yang merupakan beban bagi masyarakat Turki. Respon tersebut merupakan bentuk kekhawatiran masyarakat lokal terhadap arus migrasi pengungsi besar-besaran. Sedangkan melalui kebijakan pemerintah Turki, masyarakat Suriah memiliki hak akan kesempatan kerja yang sama dengan masyarakat lokal. Kecemasan masyarakat lokal akan kehilangan pekerjaan dikarenakan munculnya secara tiba-tiba tenaga kerja yang murah pada pengungsi Suriah. Kecemasan tersebut terjadi pada wilayah pinggiran bukan pada wilayah kota di Turki. Masyarakat Turki dalam hal ini tidak menjadikan pekerjaan tersebut masalah di negaranya. Namun, pada Syrian Barometer 2022 dijelaskan mengenai kebijakan diskriminatif pekerja dan membuka tempat usaha antara pengungsi Suriah dan masyarakat lokal Turki. Masyarakat lokal Turki menolak dalam hal pekerjaan informal dan tenaga kerja yang murah untuk memingginkan orang Suriah bekerja secara adil dan layak (Larasati et al., 2025).

Seiring bertambahnya jumlah pengungsi, kebijakan Open Door Policy ini mengalami penyesuaian untuk mengakomodasi kebutuhan penduduk pengungsi yang meningkat sekaligus menyelaraskan dengan kapasitas sosial ekonomi Turki. Pemerintah mulai mendorong integrasi pengungsi di luar kamp ke kawasan perkotaan, dengan menyediakan akses layanan kesehatan dasar, pendidikan, dan bahkan memberikan hak untuk mendapatkan izin kerja. Kebijakan ini menunjukkan perubahan dari penanganan darurat menjadi manajemen jangka panjang yang berorientasi pada inklusi sosial dan peningkatan kemandirian pengungsi. Meski menerima banyak kritik terkait beban ekonomi dan sosial yang ditimbulkan, dimana Turki telah mengeluarkan lebih dari 6 Miliar Euro atau 40 miliar dolar AS untuk membiayai kebutuhan dasar pengungsi sejak 2011 hingga 2020 (Gigliarano et al., 2016), menurut data Disaster and Emergency Management Authority (AFAD), sementara tingkat pengangguran di wilayah-wilayah dengan konsentrasi pengungsi tinggi seperti Gaziantep dan Sanliurfa meningkat rata-rata 3–5 persen dibandingkan rata-rata nasional (AFAD: Disaster and Emergency Management Authority, n.d.), Open Door Policy tetap menjadi fondasi utama dalam respons Turki terhadap krisis pengungsi Suriah. Pemerintah Turki melihat kebijakan ini sebagai kewajiban kemanusiaan sekaligus strategi geopolitik untuk menjaga stabilitas regional. Selain itu, kebijakan ini membawa implikasi positif berupa penguatan posisi Turki dalam ruang diplomasi internasional, khususnya dengan Uni Eropa dan negara-negara donor (A'yuni, 2019).

Pada prakteknya, Open Door Policy juga menghadapi berbagai tantangan, seperti tingginya kebutuhan sumber daya untuk mendukung layanan dasar, ketimpangan akses antara pengungsi di kamp dan di kota, serta munculnya kecemburuan sosial dengan warga lokal. Penanggulangan isu ini memicu berbagai program pelatihan keterampilan dan pemberian izin

kerja yang diupayakan untuk mengurangi ketegangan sosial dan meningkatkan kesejahteraan pengungsi. Implementasi kebijakan ini terus dipantau dan disesuaikan dengan situasi di lapangan yang dinamis, terutama terkait perubahan kondisi politik di Suriah dan hubungan Turki dengan Uni Eropa (A'yuni, 2019).

Pasca tahun 2016, kebijakan Open Door Policy Turki terhadap pengungsi Suriah mengalami perubahan signifikan yang dipengaruhi oleh dinamika politik domestik dan tekanan internasional, terutama dari Uni Eropa. Salah satu momentum penting adalah penandatanganan Joint Action Plan antara Turki dan Uni Eropa pada Maret 2016, yang menjadi kerangka kerja utama pengelolaan arus pengungsi dan migrasi ke kedua wilayah. Kesepakatan ini menegaskan bahwa Turki akan memperketat pengawasan perbatasan dan mengendalikan migrasi ilegal ke Eropa, sementara Uni Eropa berkomitmen memberikan bantuan keuangan sebesar beberapa miliar euro untuk mendukung penanganan pengungsi di Turki dan mempercepat proses integrasi. Dalam konteks ini, Turki mulai melakukan pengawasan lebih ketat di perbatasan Suriah, membatasi masuknya pengungsi baru, dan menolak pengungsi yang datang secara ilegal melalui jalur-jalur berisiko. Kebijakan ini menandai transisi dari fase penerimaan terbuka tanpa batas ke era kontrol lebih selektif sambil tetap menjaga perlindungan bagi mereka yang sudah tercatat secara resmi. Pemerintah Turki juga aktif mengupayakan pemulangan sukarela pengungsi yang dianggap sudah aman untuk kembali ke kampung halaman mereka, walaupun program ini masih banyak menghadapi kendala karena situasi keamanan di Suriah yang belum stabil (Tsourapas, 2019).

Selain itu, upaya pemerintah untuk meningkatkan integrasi sosial dan ekonomi pengungsi Suriah terus diperkuat. Setelah 2016, program pemberian izin kerja diperluas dengan tujuan mengurangi ketergantungan pengungsi pada bantuan kemanusiaan dan meningkatkan kontribusi mereka dalam kegiatan ekonomi formal. Pemerintah melakukan pelatihan keterampilan dan fasilitasi kewirausahaan untuk pengungsi, guna mendorong kemandirian serta mengurangi beban sosial dan ketegangan dengan masyarakat lokal. Meski demikian, tantangan praktik di lapangan terutama terkait birokrasi, diskriminasi, dan persaingan ekonomi masih menjadi hambatan yang harus diatasi. Pasca 2016, Turki juga semakin menekankan diplomasi migrasi dalam hubungannya dengan Uni Eropa dan dunia internasional. Posisi strategis Turki sebagai pintu gerbang pengungsi ke Eropa membuatnya memiliki leverage dalam negosiasi politik dan ekonomi, seperti mendapatkan fasilitas visa untuk warganya dan aliran dana bantuan pembangunan. Namun, hal ini juga menambah kompleksitas kebijakan domestik Turki yang harus menyeimbangkan kepentingan keamanan nasional, hubungan diplomatik, dan kebutuhan kemanusiaan bagi pengungsi (Sholihin & Alfian, 2021).

Memasuki periode 2017–2024, kebijakan Turki terhadap pengungsi Suriah semakin diwarnai oleh dinamika repatriasi dan tekanan domestik yang kian intensif. Pemerintah Turki di bawah Presiden Erdogan mulai menggeser narasi dari penerimaan terbuka menuju program pemulangan terencana, terutama melalui pembentukan zona aman di wilayah Suriah utara pasca operasi militer Efrin (2018) dan Sumber Perdamaian (2019). Zona aman ini dirancang tidak hanya sebagai penyangga keamanan, melainkan juga sebagai kawasan yang diharapkan mampu menampung kembali pengungsi Suriah secara bertahap (Ishmarakan, 2024). Secara paralel, tekanan politik domestik Turki semakin menguat seiring meningkatnya sentimen anti-

pengungsi di kalangan masyarakat Turki, terutama menjelang pemilihan umum 2023. Partai-partai oposisi menggunakan isu pengungsi sebagai komoditas politik, mendorong pemerintah untuk mempercepat program repatriasi sukarela. Namun demikian, implementasinya tetap terkendala oleh ketidakstabilan keamanan di Suriah dan keengganan sebagian besar pengungsi untuk kembali (Amin et al., 2025). Dari sisi kebijakan sosial-ekonomi, pemerintah Turki memperluas program Temporary Education Centers (TEC) guna meningkatkan akses pendidikan bagi anak-anak pengungsi, serta mendorong naturalisasi terbatas bagi pengungsi yang dianggap telah terintegrasi secara ekonomi. Pada tahun 2022–2024, jumlah pengungsi yang memperoleh kewarganegaraan Turki mencapai lebih dari 220.000 jiwa, sebuah langkah yang sekaligus mencerminkan strategi demografis jangka panjang pemerintah Turki (Saraçoğlu & Bélanger, 2025). Dengan demikian, kebijakan Turki pasca 2016 hingga 2024 mencerminkan pergeseran dari manajemen krisis darurat menuju tata kelola migrasi yang lebih terstruktur, meski tetap dihadapkan pada ketegangan antara kepentingan kemanusiaan, tekanan domestik, dan kalkulasi geopolitik.

Turki Sebagai Aktor Regional

Sikap Turki dalam merespons gelombang pengungsi bukan hanya didasarkan pada pertimbangan kemanusiaan, tetapi juga dipicu oleh kepentingan keamanan dan politiknya sendiri. Dengan secara terbuka menerima jutaan pengungsi, Turki berusaha menjaga stabilitas wilayah perbatasannya yang rawan konflik. Pada waktu yang sama, kehadiran pengungsi yang banyak di wilayah-wilayah strategis memberi Turki pengaruh yang cukup besar dalam negosiasi internasional, terutama dengan Uni Eropa dan negara-negara Barat yang menjadi destinasi akhir para pengungsi. Turki memanfaatkan situasi ini sebagai leverage diplomatik untuk memperkuat posisinya di meja perundingan, terutama terkait bantuan ekonomi dan kerjasama militer. Kebijakan migrasi dan pengungsi Turki menjadi salah satu alat tawar penting dalam hubungan bilateral dan multilateral dengan berbagai aktor global (Sholihin & Alfian, 2021).

Selain itu, Turki juga aktif dalam konteks keamanan regional dengan melakukan operasi militer di wilayah Suriah utara yang berbatasan langsung dengannya. Operasi ini tidak hanya bertujuan untuk mengamankan perbatasan dan mencegah masuknya elemen-elemen teroris, tetapi juga untuk menciptakan zona penyangga (*buffer zone*) yang aman guna memungkinkan pengungsi kembali secara bertahap ke kampung halaman mereka di masa depan. Kebijakan ini mencerminkan upaya Turki untuk mengambil peran lebih proaktif dalam menentukan masa depan politik dan keamanan Suriah, sekaligus mereduksi tekanan dari pengungsi yang menetap di wilayahnya (Ishmarakan, 2024).

Dalam perspektif hubungan internasional, Turki memainkan peran ganda sebagai mitra strategis Barat dan sebagai kekuatan regional yang memiliki agenda independen. Hal ini menimbulkan dinamika yang kompleks dalam hubungannya dengan Uni Eropa, Amerika Serikat, dan Rusia. Turki secara resmi adalah anggota NATO dan memiliki kerjasama militer serta ekonomi dengan Barat, tetapi pada saat yang sama Turki juga menjalankan kebijakan luar negeri yang sering berbenturan dengan kepentingan negara-negara besar, terutama dalam isu Suriah dan Timur Tengah. Dalam menghadapi krisis pengungsi, Turki kerap menggunakan posisinya untuk menegosiasikan perjanjian-perjanjian penting, seperti perjanjian migrasi

dengan Uni Eropa pada 2016 yang membawa dampak signifikan dalam mengontrol arus migran (Sholihin & Alfian, 2021).

Perspektif yang lebih mendalam mengenai peran strategis Turki sebagai aktor regional dapat dipahami melalui kerangka etno-linguistik dan geo-politik yang ditawarkan oleh Asep Achmad Hidayat dalam karyanya *Studi Kawasan Dunia Islam: Perspektif Etno-Linguistik dan Geo-Politik* (2012). Hidayat menjelaskan bahwa kawasan dunia Islam tidak dapat dipahami secara seragam, melainkan harus dilihat sebagai mozaik yang kaya akan keragaman etnis, bahasa, dan tradisi budaya yang membentuk identitas politik masing-masing negara. Dalam konteks ini, Turki menempati posisi yang sangat khas, ia merupakan negara yang mewarisi tradisi Kekhalifahan Utsmaniyah sekaligus tengah bertransformasi menjadi negara-bangsa modern dengan orientasi sekuler, namun tetap berakar pada identitas Islam yang menguat kembali di bawah kepemimpinan Partai Keadilan dan Pembangunan (AKP). Akar historis dan identitas keislaman inilah yang secara tidak langsung mewarnai respons Turki terhadap penderitaan sesama Muslim Suriah yang terpaksa mengungsi akibat konflik bersenjata yang berkepanjangan (Hidayat, 2012).

Lebih jauh, Hidayat (2012) menekankan bahwa geo-politik kawasan Islam sangat dipengaruhi oleh faktor kedekatan linguistik dan etnisitas yang melampaui batas-batas negara formal. Meskipun bahasa Turki dan bahasa Arab berbeda secara linguistik, keduanya terhubung oleh ikatan keagamaan yang kuat dalam kerangka peradaban Islam. Kondisi inilah yang membuat kebijakan *Open Door Policy* Turki bukan sekadar keputusan pragmatis berbasis kalkulasi ekonomi dan diplomatik, tetapi juga mengandung dimensi solidaritas peradaban yang mendorong Turki untuk hadir sebagai pelindung sesama Muslim yang teraniaya. Dimensi ini sering kali luput dari analisis berbasis teori Neorealisme yang semata-mata menekankan kepentingan material dan keseimbangan kekuatan, padahal dalam realitasnya faktor identitas keagamaan dan kebudayaan turut membentuk persepsi ancaman dan peluang dalam kebijakan luar negeri Turki.

Secara spesifik, kebijakan Turki terhadap pengungsi Suriah telah membentuk konfigurasi baru dalam hubungan antara Eropa dan Timur Tengah dalam tiga dimensi; pertama, dalam dimensi diplomatik, posisi Turki sebagai *gatekeeper* pengungsi menuju Eropa telah menjadikan isu migrasi sebagai instrumen negosiasi yang efektif, sebagaimana terlihat dalam *EU-Turkey Statement 2016* yang mengatur pengendalian arus migrasi lintas batas (Sholihin & Alfian, 2021); kedua, dalam dimensi keamanan, operasi militer Turki di Suriah utara tidak hanya bertujuan menciptakan zona penyangga bagi pengungsi, tetapi juga mempertegas peran Turki sebagai kekuatan regional yang menentukan stabilitas Timur Tengah (Ishmarakan, 2024); dan ketiga, dalam dimensi ekonomi, aliran dana bantuan dari Uni Eropa ke Turki telah memperdalam interdependensi kedua kawasan, sekaligus menciptakan dinamika baru dalam hubungan bilateral yang bersifat asimetris.

Peran Turki sebagai aktor regional tidak hanya terbatas pada aspek politik dan keamanan, tetapi juga mencakup dimensi ekonomi dan sosial. Beban ekonomi yang ditanggung untuk menampung pengungsi sangat besar, dengan biaya yang melibatkan penyediaan layanan kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial. Namun, di sisi lain, kehadiran pengungsi juga menimbulkan peluang ekonomi, terutama bagi wilayah-wilayah yang menjadi pusat konsentrasi pengungsi yang menunjang pertumbuhan sektor informal dan usaha kecil. Hal ini

juga memicu perkembangan dinamika sosial yang mengarah pada keberagaman budaya baru di Turki.

PENUTUP

Kehadiran pengungsi Suriah di Turki sejak 2011 hingga 2024 telah memberikan dampak signifikan baik secara demografis maupun sosial. Dengan jumlah lebih dari 3,3 juta pengungsi yang tersebar di berbagai wilayah, terutama di kota-kota besar, Turki mengalami perubahan komposisi penduduk yang berdampak pada berbagai aspek kehidupan masyarakat. Secara demografis, lonjakan populasi ini membawa tekanan besar terhadap infrastruktur dan layanan publik, termasuk pendidikan, kesehatan, dan perumahan, yang memerlukan penyesuaian cepat dari pemerintah dan masyarakat lokal. Dari sisi sosial, pengungsi menghadapi berbagai tantangan integrasi yang kompleks, mulai dari akses pekerjaan yang terbatas, bahasa, hingga perbedaan budaya yang kadang memicu ketegangan sosial. Namun, keberadaan mereka juga memberi kontribusi ekonomi, terutama di sektor informal, dan mendorong munculnya dinamika sosial yang lebih pluralistik.

Pemerintah Turki telah menjalankan kebijakan responsif melalui berbagai program perlindungan dan integrasi, termasuk pemberian akses pendidikan dan layanan kesehatan, serta kerja sama bilateral dengan Uni Eropa dalam mengelola arus migrasi. Meskipun demikian, tantangan seperti diskriminasi, ketidakpastian status hukum, serta tekanan ekonomi belum sepenuhnya terselesaikan. Oleh karena itu, pengembangan kebijakan yang inklusif dan berkelanjutan menjadi kebutuhan mendesak untuk meredam potensi konflik dan memaksimalkan manfaat sosial-ekonomi dari kehadiran pengungsi.

Fenomena ini menunjukkan bahwa krisis pengungsi bukan hanya persoalan kemanusiaan, tetapi juga berkait erat dengan proses transformasi sosial, politik, dan geopolitik di negara tuan rumah. Pemahaman menyeluruh terhadap ketiga dimensi ini, didukung oleh data statistik dan kajian ilmiah yang komprehensif, sangat penting bagi penyusunan strategi yang efektif dalam menanggapi krisis migrasi massal di masa depan. Dengan pendekatan yang tepat dan inklusif, Turki dapat memperkuat peran strategisnya sekaligus memastikan kesejahteraan baik warga lokal maupun pengungsi di tengah dinamika geopolitik kawasan yang terus berubah.

DAFTAR PUSTAKA

- AFAD: Disaster and Emergency Management Authority. (n.d.). *Disaster and Emergency Management Authority (AFAD)*. AFAD. Retrieved <https://www.afad.gov.tr/en>
- Agestia, N. R., Aruni, Y., & Nau, N. U. W. (2023). The Implementation of OpenDoor Policy in Dealing with the Syrian Refugee Crisis (A Case Study of Turkey- European Union Cooperation through the Emergency Social Safety Net Program 2016-2017). *Jurnal of Middle East and Islamic Studies*, 10(1), 1–17. <https://doi.org/10.7454/meis.v10i1.159>
- Alatas, M. B. I. (2020). Geopolitik dalam Studi Perbatasan Suriah-Turki. *Jurnal ICMES*, 4(1), 86–102. <https://doi.org/10.35748/jurnalicmes.v4i1.74>
- Amin, K., Sarmila, L. J., & Al Farauqi, M. D. A. (2025). Dari Pintu Terbuka ke Repatriasi: Pergeseran Kebijakan Turki terhadap Pengungsi Suriah. *JISPO Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 14(2), 201–226. <https://doi.org/10.15575/jispo.v14i2.39552>
- A'yuni, S. M. Q. (2019). *Analisa Open Door Policy Turki terhadap krisis kemanusiaan Pengungsi Suriah Tahun 2011-2019* [Undergraduate thesis]. UIN Sunan Ampel Surabaya.
- Erol, T., & Kultu, Z. (Eds.). (2022). *Refugees on the Move: Crisis and Response in Turkey and Europe (Forced Migration, 45)*. Berghahn Books.
- Gigliarano, C., Verme, P., Wieser, C., Hedlund, K., Petzoldt, M., & Santacroce, M. (2016). *The Welfare of Syrian Refugees: Evidence from Jordan and Lebanon*. Washington, DC: World Bank. <https://doi.org/10.1596/978-1-4648-0770-1>
- Hidayat, A. A. (2012). *Studi Kawasan Dunia Islam: Perspektif Etno-Linguistik dan Geo-Politik*. Rajawali Pers.
- Ishmarakan, M. (2024). Krisis Suriah di Timur Tengah: Tantangan dan Dampak Geopolitik. *KOMPASIANA*. <https://www.kompasiana.com/studiperdamaian/6753f9f8c925c44c68539ec2/krisis-suriah-di-timur-tengah-tantangan-dan-dampak-geopolitik>
- Kuntowijoyo. (2005). *Pengantar Ilmu Sejarah*. Bentang Pustaka.
- Larasati, V. L., De Fretes, C. H. J., & Wibisono, I. W. (2025). Dinamika Open Door Policy terhadap Penduduk Lokal dan Pengungsi Suriah di Turki Tahun 2019—2024. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik*, 5(6), 5395–5410. <https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i6.5816>
- Newman, D. (2006). Borders and Bordering: Towards an Interdisciplinary Dialogue. *European Journal of Social Theory*, 9(2), 171–186. <https://doi.org/10.1177/1368431006063331>
- Saraçoğlu, C., & Bélanger, D. (2025). How Turkey has governed Syrian refugees over a decade: A three-tiered class analysis. *New Perspectives on Turkey*, 73, 183–205. <https://doi.org/10.1017/npt.2025.10039>
- Scott, J. W. (2021). Cognitive geographies of bordering: The case of urban neighbourhoods in transition. *Theory & Psychology*, 31(5), 797–814. <https://doi.org/10.1177/0959354320964867>

- Sholihin, F., & Alfian, R. F. (2021). Bumerang Kerjasama EU–Turkey Joint Action Plan Terkait Penanganan. *Jurnal Sosial Politik*, 7(2), 254–270.
- Tsourapas, G. (2019). *The Syrian Refugee Crisis and Foreign Policy Decision-Making in Jordan, Lebanon, and Turkey*. SocArXiv. <https://doi.org/10.31235/osf.io/a6s58>
- UNHCR. (n.d.). *Refugees and Asylum Seekers – Türkiye*. UNHCR Türkiye. Retrieved December 27, 2025, from <https://www.unhcr.org/tr/en/kime-yardim-ediyoruz/refugees-and-asylum-seekers-tuerkiye>
- Waltz, K. N. (1979). *Theory of International Politics*. Addison-Wesley Publishing Company.
- Wanda, A. S. (2017). *Analisis Kebijakan Intervensi Turki pada Konflik Suriah 2011–2016* [Thesis]. Universitas Andalas.